



## **Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Dikota Medan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK)**

### ***Implementation of The City of Medan Regional Regulation No. 6 year 2003 concerning The Prohibition of Vamages and Begging and Improval Practices in Medan City in The Prevention and Control of Commercial Sex Workers***

**Jefri Panjaitan, Adam & Yurial Arief Lubis**

Magister Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah maraknya kegiatan prostitusi di tempat-tempat umum di kota Medan seperti di jalan setia budi kelurahan Simpang selayang Kecamatan Medan Tuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Perda kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan dalam pencegahan dan penanggulangan Pekerja Seks Komersial di kota Medan khususnya kecamatan Medan Tuntungan. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Goerge C. Edward III, adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Berikut diuraikan hasil penelitian yaitu Komunikasi, Pemerintah Daerah belum membuat forum formal untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah ini maupun bahaya dari pelacuran tersebut. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang dampak negatif dari pelacuran bahkan Peraturan Daerah yang mengaturnya. Sumber daya, kurangnya sarana dan prasarana Dinas sosial. Sikap/disposisi, implementator sudah memberikan mandat kepada eksekutor yaitu satpol PP untuk melakukan pemerantasan psk. Struktur birokrasi, sudah dilakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait seperti satpol PP, Kepolisian dan Dinas kesehatan, namun karena saran dan prasaran belum memadai, eksekusi sulit dilakukan. Selain karena tidak adanya panti rehabilitasi khusus kota Medan, tidak kooperatifnya para psk yang terjaring razia sehingga menyulitkan para petugas dalam melaksanakan kewajiban nya.

**Kata Kunci** ; Implementasi; Peraturan Daerah Kota Medan; Pekerja Seks Komersial

#### **Abstract**

*The problem in this study is the proliferation of prostitution activities in public places in the city of Medan, such as Jalan Setia Budi, Simpang Selayang Village, Medan Tuntungan District. This study aims to find out how the implementation of the Medan City Regional Regulation No. 6 of 2003 concerning the Prohibition of Homeless and Begging and Immoral Practices in the City of Medan in the prevention and control of Commercial Sex Workers in the city of Medan, especially the Medan Tuntungan sub-district. This study uses the theory put forward by an expert named George C. Edward III, while the type of research used is qualitative research with data collection techniques of observation, interviews, documentation. The following describes the research results, namely 1). Communication, the Regional Government has not created a formal forum to socialize this Regional Regulation and the dangers of prostitution. Many people do not know about the negative impact of prostitution and even the Regional Regulations that regulate it. 2). Resources, lack of facilities and infrastructure Social services . 3). Attitude/disposition, the implementer has given a mandate to the executor, namely the Satpol PP to eradicate sex workers. 4). The bureaucratic structure has coordinated with related parties such as the Satpol PP, the Police and the Health Service, but because the suggestions and infrastructure have not been adequate, execution is difficult. Apart from the absence of a special rehabilitation center for the city of Medan, the uncooperativeness of the sex workers caught in the raids made it difficult for the officers to carry out their obligations.*

**Keyword:** Implementation; Medan City Regional Regulation; Commercial Sex Workers

**How to Cite:** Panjaitan, J. Adam. & Lubis, Y. A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Dikota Medan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (Psk). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1) 2022: 1-8,

\*E-mail: [jefripanjaitan@gmail.com](mailto:jefripanjaitan@gmail.com)



## **PENDAHULUAN**

Masalah pekerja seks komersial/prostitusi di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial yang semakin kompleks. Sebagaimana psk semakin berkembang dan semakin banyak populasinya seiring perkembangan zaman, bahkan prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi sesuatu yang biasa dan hampir ada di setiap daerah, tidak hanya di kota-kota besar namun mencakup keseluruhan daerah terpencil sekalipun. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu efek akan perubahan kebutuhan yang semakin instan. Masalah psk atau yang sering dikenal juga dengan prostitusi merupakan suatu hal yang menyimpang dari segala jenis norma, baik itu norma agama, norma hukum dan norma adat istiadat. Norma sosial jelas mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan telah diatur pula di dalam peraturan perundang-undangan mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi yuridis yang terdapat dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana dan tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), mereka yang mencari pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP) dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacuran (pasal 297 KUHP).

Hal ini memang menarik perhatian dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan upaya untuk menghentikan prostitusi, seperti lokalisasi, penertiban para pekerja seks komersial (PSK) dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak memberikan hasil yang maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk menyelesaikan masalah prostitusi dengan membudidayakan pekerja seks komersial yang berhasil ditangkap untuk melawan kejahatan tanpa harus dihukum.

Begitu juga halnya dengan prostitusi yang terjadi di kota Medan yang semakin lama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat. Maraknya prostitusi di kota Medan menuntut pemerintah membuat kebijakan untuk menekan angka prostitusi ini. Oleh karena itu Pemerintah kota Medan membuat peraturan daerah kota Medan no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemisian serta praktek tunasusila yang ditetapkan oleh Walikota Medan pada saat itu dijabat oleh Bapak Drs. H. Abdillah, MBA. Tujuan dari peraturan daerah ini untuk mewujudkan tercapainya kota Medan menjadi kota bersih dari kegiatan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk menimbulkan belas kasihan orang lain dalam bahasa lain pengemisian di jalan-jalan umum, pelataran jembatan-jembatan penyebrangan yang ada di kota Medan, perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan yang melakukan praktek tunasusila. Dari data-data yang dipaparkan oleh Dinas Sosial kota Medan dalam rentang waktu dari tahun 2012 hingga 2017, ada sebanyak 70 orang Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terjaring razia. Pada tahun 2013, sebanyak 64 orang PSK. Sementara itu pada tahun 2014 sebanyak 56 orang PSK. Sebagaimana data yang diatas dapat diperoleh dari tahun 2015 jumlah PSK yang terjaring razia oleh Dinas Sosial kota Medan sebanyak 32 orang PSK. Angka ini menunjukkan masih banyaknya PSK di kota Medan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah PSK di kota Medan yang terjaring razia oleh Dinas Sosial kota Medan sebanyak 29 orang PSK. Angka ini jika dibandingkan dengan tahun 2017 memang mengalami penurunan yaitu sebanyak 0,3% namun jika dilihat angka ini sebelum memberikan hasil

yang maksimal hanya penurunan sebesar 0,3%. Dan kemudian jika dilihat dari data yang diberikan Dinas Sosial kota Medan pada tahun 2017 jumlah PSK yang terjaring razia sebanyak 28 Orang, angka ini belum juga memberikan efek jera kepada PSK dan inilah yang terjadi dikota Medan hingga sekarang PSK masih banyak dijumpai dikota Medan khususnya didaerah- daerah tertentu.

Maraknya PSK dikota medan terlihat dari banyaknya tempat-tempat umum yang dijadikan sebagai tempat prostitusi, contohnya saja jln.Setia budi atau yang lebih akrab dikenal simpang selayang. Tempat ini sudah tid ak asing lagi di telinga masyarakat kota medan. Simpang selayang dikenal sebagai tempat prostitusi yang sangat terbuka karena ketika anda melewati jalan tersebut, anda akan melihat begitu banyak pekerja seks komersial (PSK) yang berdiri di pinggir jalan untuk menunggu tamu penjaja seks.

Untuk menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) di kota Medan maka Pemko Medan telah menerbitkan PERDA KOTA MEDAN NO 6 TAHUN 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif adalah pengamatan sosial secara langsung yang bergantung pada pengamatan manusia di dalam suatu kawasan (Moleong 2000:3). Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa kata-kata, artinya data yang dianalisis tidak berupa angka. Instrument yang dipakai berbentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penelitian dilaksanakan penulis di Desa Sionom Hudon Tonga Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan pada bulan Januari- Mei 2021. Adapun informan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: Informan kunci penulis dalam penelitian adalah kepala pengelola rehabilitasi masalah sosial dibidang rehabsos kota medan (Bapak Lomo M Tobing). Informan utama yaitu para pekerja seks komersial (psk) yang biasa mangkal di lokasi penelitian yaitu (Mawar, Ina, Agnes) nama samaran. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di lokasi prostitusi yaitu (Rahmad, Agus ginting, Hemawan pardede.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3, yaitu: Wawancara, Penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber dengan berpedoman pada pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan secara terbuka sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, penulis menggali sebanyak mungkin tentang implementasi Perda kota Medan no 6 tahun 2003 dalam pencegahan dan penanggulangan prostitusi jalanan di Simpang Selayang. Studi pustaka, Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh penulis dari buku, karya ilmiah dan pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi, Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal, surat kabar.

Selanjutnya adapun langkah-langkah peneliti untuk menganalisis peran kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani antara lain: Reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan, agar masalah yang diteliti dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan penulis dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data adalah suatu

proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat penulis dari proses wawancara dan catatan- catatan yang didapat dari lapangan sehingga orang lain mudah untuk memahaminya. Kesimpulan data adalah penarikan kesimpulan data yang dilakukan agar dapat memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang dicantumkan penulis di penelitian ini. (Suryani, A. I., & Suharyanto, A. 2016)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Peraturan Daerah (perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (psk) di Kelurahan Simpang Selayang**

**Komunikasi.** Seluruh pegawai Dinas sosial kota Medan khususnya bagian rehabsos sudah memahami tugas dan fungsi masing-masing pegawai, hal ini sekaligus berarti isi kebijakan pemerintah tentang larangan gelandangan dan pengemisian serta praktek susila yang menjadi tanggung jawab Dinas sosial sudah dipahami, Hasil wawancara ini juga didukung dengan hasil pengamatan penulis diruangan tempat pelaksanaan pelayanan, dimana para pegawai menunjukkan sudah paham nya terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Disamping itu juga sudah sangat jelas tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja perangkat Daerah. (Nasution dkk, 2021; Pratama, 2022).

**Sumber daya.** Kinerja dari suatu organisasi/perangkat daerah akan tinggi, salah satu penentunya adalah kecukupan dari kualitas dan kuantitas pegawai pada organisasi tersebut. pada rehabsos Dinas sosial kota Medan ada tiga pembagian seksi, yaitu seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia diluar panti dan/atau lembaga, seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti dan/atau lembaga, dan seksi rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan manusia. Dan semua seksi pada rehabsos ini memiliki staf yang relatif bagus dalam kualitas maupun kuantitas.

**Disposisi.** Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi pada kebijakan yang telah ditetapkan. semua personil yang bertugas di Dinas sosial khususnya di subbid rehabsos memiliki keahlian dan dedikasi tinggi terhadap tugas yang dilaksanakannya, ini terbukti dari hasil yang kami dapat terkait berkurangnya jumlah psk yang terjaring razia setiap tahunnya. Setiap pegawai pada setiap organisasi dalam melaksanakan tupoksinya mendapat hak gaji. Penggajian pada Dinas sosial kota Medan adalah sesuai dengan penggajian PNS sebagaimana aturan yang telah ditetapkan di Indonesia. Selain itu semua pegawai mendapatkan tunjangan sesuai dengan daerah sebagaimana diatur dalam perda yang berlaku di kota Medan. (Tarigan dkk, 2021; Nasution dkk, 2021).

**Struktur organisasi.** SOP sebagai acuan Dinas Sosial kota Medan dalam mekanisme pelaksanaan pekerjaan, SOP ini dimaksud agar adanya pembagian tugas pokok dan fungsi, untuk memperjelas dan mempermudah proses pemberian tugas, wewenang, serta tanggung jawab kesetiap pegawainya, memudahkan dan terjadinya kesalahan dan kegagalan didalam proses kerja serta memudahkan proses pengontrolan kerja masing-

masing pegawainya. Dengan keluarnya aturan berupa peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang kedudukan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja perangkat daerah termaksud Dinas sosial kota Medan, maka fregmentasi diminimalisir. (Pratama dkk, 2019;Lubis dkk,2019).

### **Problematika Dinas Sosial Kota Medan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Dalam Pencegahan Dan penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK).**

**Faktor pendukung.** Salah satu faktor yang mendukung pemberantasan pelacuran di kota Medan Khususnya di daerah Simpang Selayang ini yakni banyaknya warga yang peduli dan ikut serta baik dalam bentuk laporan tentang praktik pelacuran yang sedang terjadi yang masuk ke Dinas sosial. masyarakat sering membuat aduan ke kami, bukan Cuma dari pihak masyarakatnya tetapi Kami juga sering terima laporan dari pihak kelurahan bahkan kecamatan. tapi memang aduan yang paling sering kami terima ya tentang keresahan masyarakat karena adanya tempat-tempat kost yang dijadikan sebagai lokasi melakukan transaksi ataupun keresahan masyarakat tentang praktek asusila, jadi tidak melulu hanya karena Wanita tuna susila, ada yang kumpul kebo, ada yang masih berstatus pacaran tapi sudah melakukan hubungan suami istri. Semua laporan tersebut kami terima dari aplikasi yang bernama LAPOR dan bisa juga megakseswww.pemkomedan.co.id. aplikasi dan situs ini disediakan oleh pemerintah kota Medan untuk menampung seluruh keresahan masyarkat. (Purba, J.F. Tarigan, U. & Nasution, I. & Suharyanto, A. 2019).

**Faktor penghambat.** Penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomon 6 Tahun 2003 dalam pencegahan dan penanggulangan WTS ini cukup sulit dilakukan dilapangan, kesulitannya bukan hanya terletak pada saat melakukan operasi razia tetapi pada saat proses rehabilitasinya. satu kendala yang sampai saat ini belum bisa kami tangani itu proses rehabilitasi, karena proses rehabilitasi yang selama ini kami lakukan melibatkan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, kenapa? Karena meraka lah memang yang memiliki pantinya. Jadi proses rehabilitasi itu ketika kami tertibkan,kami data, kami dokumentasi,lakukan assessment, tentukan mana yang bisa dikirimkan kepanti, pastinya kami juga akan menghubungi dulu rekan yang berada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Jadi Dinas Sosial kota Medan sampai saat ini belum memilki panti rehabilitasi. Sebenarnya sudah ada wacana untuk melakukan pembangunan panti rehabilitasi di kota Medan namun sampai sekarang pembangunan fisik nya belum terealisasi karena efek pandemi ini, selain itu kasih sayang yang diberikan pemerintah ini sebenarnya tanggung, karena ketika para Wanita tuna susila ini dibina dipanti,ditempah, dengan harapan setelah keluar dari panti mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, karena skill yang diberikan dari panti. Masalahnya ketika mereka keluar dari panti Cuma skill aja yang diberikan, modalnya tidak ada. Harusnya pemerintah mengunjuk satu Dinas yang mampu memberikan modal ketika mereka keluar dari panti rehabilitasi, sehingga mereka tidak balik lagi ke dunia prostitusi. Dan saya yakin ketika hal ini dilakukan, para wts ini pasti berkurang.

## **SIMPULAN**

Beberapa hambatan dalam implementasi Peraturan daerah kota Medan No 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemisian serta praktek susila dalam pencegahan dan penanggulangan pekerja seks komersial yaitu : Tidak adanya fasilitas panti rehabilitasi khusus kota Medan untuk melakukan pembinaan para pekrja seks komersial yang terjarin razia. Kurangnya perhatian pemerintah dalam menangani masalah pekerja seks komersial. Banyak para pekerja seks komersial yang tidak kooperatif saat dilakukan razia

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Amar S., Idris., Pratama. I., Anis, A. (2020). Exploring the Link between Income Inequality, Poverty Reduction and Economic Growth: An ASEAN Perspective. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol, 11(2)*, 24-41.
- Anisa, Firdaus (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pelacuran Dan Relevansi Terhadap Pemberantasan Pelacuran Terselubung. Malang: Universitas Negeri Maulana Malikibrahim.
- Atrizka, D., & Pratama, I. (2022). The Influence of Organizational Leadership and Coaches on Indonesian Athletes' Adversity Quotient (Intelligence). *Revista de Psicología del Deporte (Journal of Sport Psychology)*, 31(1), 88-97.
- Atrizka, D., & Pratama, I. (2022). The Influence of Organizational Leadership and Coaches on Indonesian Athletes' Adversity Quotient (Intelligence). *Revista de Psicología del Deporte (Journal of Sport Psychology)*, 31(1), 88-97.
- Atrizka, D., Lubis, H., Simanjuntak, C. W., & Pratama, I. (2020). Ensuring Better Affective Commitment and Organizational Citizenship Behavior through Talent Management and Psychological Contract Fulfillment: An Empirical Study of Indonesia Pharmaceutical Sector. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(1), 545-553.
- Atrizka, D., Pratama, I., Pratama, K., & Suharyanto, A. (2022). Edukasi Masyarakat Lingkungan VIII Titi Kuning Dalam Mendampingi Anak Belajar Daring. *Pelita Masyarakat*, 3(2), 118-124.
- Atrizka, D., Pratama, I., Pratama, K., & Suharyanto, A. (2022). Edukasi Masyarakat Lingkungan VIII Titi Kuning Dalam Mendampingi Anak Belajar Daring. *Pelita Masyarakat*, 3(2), 118-124.
- Cahyadi, L., Cahyadi, W., Cen, C. C., Candrasa, L., & Pratama, I. (2022). HR practices and Corporate environmental citizenship: Mediating role of organizational ethical climate. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 17-33.
- Candrasa, L., Cen, C. C., Cahyadi, W., Cahyadi, L., Pratama, I. (2020). Green Supply Chain, Green Communication and Firm Performance: Empirical Evidence from Thailand. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (12), 398-406. doi:10.31838/srp.2020.12.65
- Danilwan, Y., & Dirhamsyah, I. P. (2022). The Impact of The Human Resource Practices on The Organizational Performance: Does Ethical Climate Matter?. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 1-16.
- Danilwan, Y., Dirhamsyah., Pratama, I. (2020). The Impact of Consumer Ethnocentrism, Animosity And Product Judgment On The Willingness To Buy. *Polish Journal of Management Studies 2020; 22 (2): 65-81.*
- Danilwan, Y., Isnaini, . D. B. Y. & Pratama, . I. (2020) Psychological Contract Violation: A Bridge between Unethical Behavior and Trust. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (7), 54-60.
- Danilwan, Y.; Isnaini, D. B.; Pratama, I.; Dirhamsyah, D. 2020. Inducing organizational citizenship behavior through green human resource management bundle: drawing implications for environmentally sustainable performance. A case study, *Journal of Security and Sustainability Issues* 10(Oct): 39-52.
- Hakimah, Y., Pratama, I., Fitri, H., Ganatri, M., Sulbahrie, R. A. (2019) Impact of Intrinsic Corporate Governance on Financial Performance of Indonesian SMEs. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol, 7(1)*, 32-51.

- Isnaini, D. B. Y., Nurhaida, T., & Pratama, I. (2020). Moderating Effect of Supply Chain Dynamic Capabilities on the Relationship of Sustainable Supply Chain Management Practices and Organizational Sustainable Performance: A Study on the Restaurant Industry in Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol, 9(1)*, 97-105.
- Izar, J., Nasution, M. M., & Ilahi, P. W. (2020). The Stages, Comparisons And Factors Of First Language Acquisition Of Two-Years-Old Male And Female Child. *Jetli: Journal of English Teaching and Linguistics, 1(2)*, 63-73.
- Izar, J., Nasution, M. M., & Ratnasari, M. (2020). Assertive Speech Acts in Mata Najwa Program of Episode Gare-Gare Corona. *Lexeme: Journal of Linguistics and Applied Linguistics, 2(1)*, 53-58.
- Izar, J., Nasution, M. M., Afria, R., & Harianto, N. (2021). Expressive Speech Act in Comic Bintang Emon's Speech in Social Media about Social Distancing. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 5(1)*, 148-158.
- Izar, S. L., Nasution, M. M., Izar, J., & Ilahi, P. W. (2021). The The Analysis Of Cooperation Principles Use On Podcast Of Deddy Corbuzier And Nadiem Makarim "Having College Is Not Important. *JETLi: Journal of English Teaching and Linguistics, 2(1)*, 23-30.
- Lubis, H., Kumar, D., Pratama, I., Muneer, S. (2015). Role of psychological factors in individuals investment decisions. *International Journal of Economics and Financial Issues, 2015, 5*, pp. 397-405.
- Lubis, H., Pratama, K., Pratama, I., Pratami, A. (2019). A Systematic Review of Corporate Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol, 6(9)*, 415-428.
- Maggasingang, D., Solong, A., Nadhar, M., Pratama, I. (2020). The Factors Affecting the Corporate Cash Holdings in Listed Firms of Indonesia: Does Corporate Governance Matter?. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol 14(5)*, 1215-1231.
- Marbun, D. S., Effendi, S., Lubis, H. Z., & Pratama, I. (2020). Role of Education Management to Expediate Supply Chain Management: A Case of Indonesian Higher Educational Institutions. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol, 9(1)*, 89-96.
- Nasution, J., Dasopang, E. S., Raharjeng, A. R. P., Gurning, K., Dalimunthe, G. I., & Pratama, I. (2021). Medicinal plant in cancer pharmaceutical industry in Indonesia: a systematic review on applications and future perspectives, 20, 21.
- Nasution, M. M., Izar, J., & Afifah, I. H. (2021). An Analysis of Hate Speech Against K-Pop Idols and Their Fans on Instagram and Twitter from The Perspective of Pragmatics. *JETLi: Journal of English Teaching and Linguistics, 2(2)*, 91-99.
- Nugroho, A., Christiananta, B., Wulani, F., Pratama, I. (2020). Exploring the Association Among Just in Time, Total Quality and Supply Chain Management Influence on Firm Performance: Evidence from Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol, 9(2)*, 920-928.
- Nu'man, A. H., Nurwandi, L., Bachtiar, I., Aspiranti, T., Pratama, I. (2020). Social Networking, and firm performance: Mediating role of comparative advantage and sustainable supply chain. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol, 9(3)*, 664-673.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan.
- Pratama, I. (2022). Corporate Governance And Company Attributes On The Financial Reporting Timeline: Evidence Of Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(3)*.
- Pratama, I. (2022). Tata Kelola Perusahaan dan Atribut Perusahaan pada Ketepatan Pelaporan Keuangan: Bukti dari Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 4 (3): 1959-1967*
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin, N. (2019). Corporate social responsibility disclosure (CSR) quality in Indonesian public listed companies. *Polish Journal of Management Studies, 20 (1)*, 359-371.
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin, N., (2020). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure Quality in Indonesian Companies. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol 13(4)*, 442-463.
- Pratama, K., Lubis, H., Pratama, I., Samsuddin, S.F., & Pratami, A. (2019). Literature review of corporate social responsibility disclosure. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 11(5)*, 1397-1403.
- Pratami, A., Feriyanto, N., Sriyana, J., & Pratama, I. (2022). Are Shariah Banking Financing patterns pro-cyclical? An Evidence from ASEAN Countries. *Cuadernos de Economía, 45(127)*, 82-91.
- Purba, J.F. Tarigan, U. & Nasution, I. & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *PERSPEKTIF, 8 (2): 77-83*.
- Saragih et al., (2020). *Polish Journal of Management Studies 2020; 21 (2): 384-397*

**Jefri Panjaitan, Adam & Yurial Arief Lubis.** Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisian Serta Praktek Susila Dikota Medan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (Psk)

- Saragih, J., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F., & Tarigan, A. (2020). Can Organizational Justice Dimensions Mediate Between Leader Mindfulness and Leader-Member Exchange Quality: An Empirical Study in Indonesia Pharmaceutical Firms. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(2), 545-554.
- Saragih, J., Tarigan, A., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F. (2020). The Impact of Total Quality Management, Supply Chain Management Practices and Operations Capability on Firm Performance. *Polish Journal of Management Studies*, 21 (2), 384-397.
- Saragih, J., Tarigan, A., Silalahi, E. F., Wardati, J., Pratama, I. (2020). Supply chain operational capability and supply chain operational performance: Does the supply chain management and supply chain integration matters. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(4), 1222-1229.
- Sibuea, M. B.; Sibuea, S. R.; Pratami, A.; Pratama, I.; Nasution, R. 2020. Is business friendliness enhancing energy consumption in the ASEAN region?, *Journal of Security and Sustainability Issues* 9(M): 409-419.
- Silitonga, K. A. A., Ahmad, . F., Simanjuntak, . C. W. & Atrizka, . D. (2020) Exploring the nexus between the HR practices and work engagement: The mediating role of Job Demand. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (7), 342-351. doi:10.31838/srp.2020.7.53
- Suharsimi Arikunto (1992). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rineka Cipta.
- Sujianto., Yuliani, F., Syofian., Saputra, T, Pratama, I. (2020). The Impact of The Organizational Innovativeness On The Performance Of Indonesian Smes. *Polish Journal of Management Studies* 2020; 22 (1): 513-530.
- Suprojo, suprojo (2017). *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dikabupaten Demak*. IJCLS.
- Suryani, A. I., & Suharyanto, A. (2016). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Sibuhuan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4(1), 86-99.
- Susilawati, E., Khaira, I., & Pratama, I. (2021). Antecedents to Student Loyalty in Indonesian Higher Education Institutions: The Mediating Role of Technology Innovation. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 21(3), 40-56.
- Tambunan, R. W., Muchtar, M., Agustian, P., Salim, A., Aisyah, L., Marpaung, B. A., & Nasution, M. M. (2018). Critical discourse: Applying Norman Fairclough theory in recep Tayyip Erdoğan's balcony speech. *Proceedings of ISELT FBS Universitas Negeri Padang*, 6, 174-183.
- Tanjung, A. A., Ruslan, D., Lubis, I., & Pratama, I. (2022). Stock Market Responses to Covid-19 Pandemic and Monetary Policy in Indonesia: Pre and Post Vaccine. *Cuadernos de Economía*, 45(127), 120-129.
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning*. uma. ac. id.
- Tarigan, R. S. (2017). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC)*.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- Undang-undang
- Utami, C. W., Indrianto, A. T. L., Pratama, I. (2019). Agricultural Technology Adoption in Indonesia: The Role of the Agriculture Extension Service, the Rural Financing and the Institutional Context of the Lender. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 7(7), 258-276.
- Utami, C. W., Sumaji, Y. M. P., Susanto, H., Septina, F., & Pratama, I. (2019). Effect of Supply Chain Management Practices on Financial and Economic Sustainable Performance of Indonesian SMEs. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 8(1), 523-535.
- Utami, Sumaji, Susanto, Septina & Pratama, 2019 Utami, Sumaji, Susanto, Septina & Pratama
- Wardhani, I. I. Pratami, A., & Pratama, I., (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*. 7 (2): 126-139
- Yuliar, Vera (2007). *Prostitusi Atau Pelacuran*. Universitas Muhammadiyah Malang.